



Metro (Hal. 18)

Jum'at, 28 Februari 2020

Kontraktor di SMPN 12 Bitung Wajib Bayar Rp200 Juta

Kena sanksi denda akibat keterlambatan proyek

METRO, BITUNG- Kontraktor pengerjaan proyek di SMP Negeri 12 Bitung dikenai sanksi denda. Sanksi dijatuhkan setelah pelaksanaan proyek tak kunjung selesai meski sudah diberi adendum. "Sudah ada sanksi, mereka harus bayar Rp200 juta dalam bentuk pajak," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bitung, Julius Ondang, Kamis (27/02) kemarin.

Secara kasat mata realisasi pekerjaan sebenarnya hampir tuntas. Yang tertinggal hanyalah pemasangan pintu dan jendela bangunan. Namun karena waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup, mau tidak mau tindakan tegas harus diambil.

"Dan pemberian sanksi denda diatur dalam ketentuan. Jadi wajib kami berikan ketika situasi seperti ini," terang Ondang.

Proyek di SMP Negeri 12 Bitung berupa pembangunan ruang kelas baru. Pekerjaan itu menyedot anggaran di atas Rp1 miliar. Sesuai isi kontrak, waktu pelaksanaan proyek maksimal 70 hari kalender sejak 15 Oktober tahun lalu.

Namun sayang, meski sudah diberi tambahan waktu hingga tanggal 19 Februari lalu, proyek dimaksud tetap tak selesai. Alhasil, sanksi pun harus diterima pihak rekanan.

"Tapi meskipun sudah ada sanksi kita tidak akan memutus kontrak. Pertimbangannya karena pekerjaan yang tersisa tinggal pasang pintu dan jendela. Jadi dilanjutkan saja su-

paya tuntas," papar Ondang.

Situasi yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan proyek di SMP Negeri 19. Karena sudah lewat waktu kontraktor pelaksana juga dikenai denda. Bedanya, berapa besaran denda untuk pekerjaan itu masih dihitung.

"Kalau SMP Negeri 19 masih dihitung. Di situ pekerjaan yang tersisa masih lebih banyak. Selain pasang jendela dan pintu ada juga pengecatan dan pemasangan pagar depan," bebarnya.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 12 Bitung, Robby Kawengian, berharap ruang kelas baru yang dibangun cepat selesai. Ia ingin dalam waktu dekat ruangan tersebut sudah bisa digunakan.

"Karena kasihan anak-anak. Harusnya sudah menempati



» Pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 12 Bitung mengalami keterlambatan. Akibatnya, kontraktor pelaksana proyek dikenai sanksi denda. (ist)

ruangan baru tapi nyatanya masih menunggu. Akibatnya untuk sementara mereka belajar dulu di ruangan laboratorium dan keterampilan. Dan kalau mau jujur jelas itu tidak nyaman bagi mereka," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bitung, Hasan Suga, memberi dukungan atas keputusan yang diambil Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan. Baginya, pemberian sanksi denda sudah tepat dilakukan.

"Kalau betul sudah dijatuhi denda itu sudah tepat. Memang harus begitu, pengerjaan proyek ini sudah sangat terlambat. Apapun alasannya kontraktor pelaksana memang harus bertanggung jawab," tandasnya.

Hasan juga sependapat jika

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memutus kontrak. Keputusan itu dianggap benar karena mementingkan pemanfaatan proyek.

"Kalau diputus kontrak berarti proyek tidak selesai dan belum bisa digunakan. Yang rugi siapa? Tentu sekolah dan para siswa. Jadi sudah betul diteruskan karena memang tinggal sedikit," sebutnya. (ast)